



ANALISIS PENERAPAN *GREEN ACCOUNTING* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Oleh :
Hamidi

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ. Riau Kepulauan

e-mail : hamidi0608@yahoo.com

Abstrak

Aktivitas suatu perusahaan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Penerapan *green accounting* pada perusahaan dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan yang berakhir pada peningkatan kinerja keuangan dengan keuntungan lingkungan yang dapat dikelola dan dilestarikan dengan baik sesuai peraturan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *green accounting* yang dilakukan oleh perusahaan dan mengetahui pengaruh *green accounting* terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Kata Kunci : *Green Accounting, PROPER, Kinerja Keuangan*

A. Pendahuluan

Konsep *Green Accounting* ini mulai berkembang di Eropa sejak tahun 1970-an. *Green Accounting* adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, dan menyiapkan laporan baik data lingkungan maupun finansial dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya (Cohen dan Robbins 2011:190 dalam Aniela, 2012). *Green Accounting* adalah akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. *Green accounting* merupakan langkah awal yang menjadi solusi masalah lingkungan tersebut. Penerapan *green accounting* akan mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuan penerapan akuntansi lingkungan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek (Santi, 2016). Akuntansi lingkungan dalam penerapannya di Indonesia masih belum efektif dan banyak perusahaan

berdiri tanpa mempedulikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Yoshi Aniela (2012) melakukan penelitian berdasarkan praktik di lapangan, kajian literatur, serta penelitian empiris dan akademis diketahui bahwa penerapan *green accounting* memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial perusahaan, yaitu meningkatnya persepsi positif dari konsumen yang berakhir pada peningkatan penjualan dan laba perusahaan. Selain berdampak pada kinerja finansial, penerapan *green accounting* juga berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dalam dimensi kesehatan lingkungan (*environmental health*) maupun dalam ketahanan lingkungan (*environmental vitality*). Selain itu Dian Imanima Burhany (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi akuntansi lingkungan berpengaruh positif pada kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan kinerja lingkungan menandakan perusahaan telah menerapkan akuntansi lingkungan dengan baik yang berakir pada peningkatan kinerja keuangan.

Selain itu juga disebutkan bahwa melalui aktivitas-aktivitas lingkungan dan

pengungkapan aktivitas-aktivitas tersebut pada laporan tahunan menyebabkan pengguna laporan keuangan (investor, manajemen, kreditor) akan mendapatkan informasi yang membantu para pengguna informasi tersebut dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan di masa yang akan datang. Kemudian manajemen dapat melakukan efisiensi operasional perusahaan dan menentukan kebijakan lingkungan sehingga dampak negatif pada lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan dapat diminimalisir. Sementara itu Pujiasih (2013) dalam Riska dan Nur (2016) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan yang baik, menjadikan keberadaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan diterima oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan yang juga didasari oleh faktor *stakeholder* seperti masyarakat dan konsumen.

Kementerian Lingkungan Hidup pada saat ini telah membuat suatu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau yang disebut PROPER. Program ini diharapkan dapat mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (1) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (2) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*clean production*) (menlh.go.id). Program ini juga bertujuan untuk memacu perusahaan lain untuk mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan. Telah berdiri jasa konsultan lingkungan yang membantu mengarahkan perusahaan ke arah ramah lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan disekitar perusahaan. Juga telah berdiri jasa pengangkut limbah yang nantinya akan mengumpulkan limbah dari perusahaan dan

kemudian dibuang ke perusahaan lain yang memiliki izin untuk mengolah kembali limbah yang telah dibuang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pengaruh penerapan *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan?”

C. Tinjauan Pustaka

Teori *Stakeholder* dan Teori Legitimasi

Pramelasari (2010) dalam Pujiasih (2013) menjelaskan bahwa manajemen sebuah organisasi diharapkan melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan kemudian melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut kepada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi perusahaan berperan dalam lingkungan sekitar (Deegan dalam Pujiasih 2013). Organisasi memiliki banyak *stakeholder* seperti karyawan, masyarakat, negara, pasar modal dan lain-lain.

Legitimacy Theory menyatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat di mana mereka berada (Rawi, 2010 dalam Pujiasih, 2013). Beberapa studi tentang PSL (Pengungkapan Sosial dan Lingkungan) telah menggunakan teori legitimasi sebagai dasar menjelaskan PSL (Wilmshtuts dan Frost dalam Pujiasih, 2013).

Definisi *Green Accounting*

Menurut Cohen dan Robbins, (2011:190) dalam Aniela, (2012) *Green Accounting* atau akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*) didefinisikan sebagai :

“A style of accounting that includes the indirect costs and benefits of economic activity-such as environmental effects and health consequences of business decisions and plans”

Yang artinya adalah bahwa akuntansi lingkungan adalah jenis akuntansi yang memasukkan biaya dan manfaat tidak langsung dari aktivitas ekonomi, seperti dampak lingkungan dan konsekuensi kesehatan dari perencanaan dan keputusan bisnis.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) akuntansi lingkungan adalah:

“Fungsi penting akuntansi lingkungan adalah untuk menyajikan biaya-biaya lingkungan bagi para *stakeholder* perusahaan, yang mampu mendorong mengidentifikasi cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan, perusahaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan.”

Menurut Aniela, (2012) *Green Accounting* merupakan akuntansi yang didalamnya mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan.

Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Penting bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya (Nuryanti dkk, 2015).

Menurut Santoso (2012) dalam Hidayati (2016), pentingnya praktek akuntansi lingkungan bagi perusahaan berkaitan dengan fungsi internal dan fungsi eksternal.

1. Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri dimana pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan oleh manajer perusahaan.

2. Fungsi eksternal berkaitan dengan dengan aspek pelaporan keuangan perusahaan dimana pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat untuk *stakeholder* atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya.

Saat ini tidak ada standar yang baku mengenai item-item pengungkapan akuntansi lingkungan. Namun beberapa institusi telah mengeluarkan rekomendasi pengungkapan lingkungan, antara lain Dewan Ekonomi dan Sosial-Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC-PBB), *Ernst and Ernst, Institute of Chartered Accountant in England and Wales* (ICEAW) dan *Global Reporting Initiative* (GRI). Motivasi yang melatarbelakangi perusahaan untuk melaporkan permasalahan lingkungan lebih didominasi oleh faktor kesukarelaan (Ball, Choi dalam Musyarofah, 2013).

Biaya Lingkungan

Green cost atau biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling nyata dalam mengukur ketidakpastian. Pada dasarnya biaya lingkungan berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik (Dewi: 2016).

Definisi biaya lingkungan menurut *Environmental Protection Agency* (EPA) dalam Dewi (2016) antara lain :

1. Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktivitas perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.
2. Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan dengan seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan.

Menurut Ikhsan dalam Hidayati, (2016) dalam akuntansi lingkungan ada komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya:

1. Biaya operasionalisasi bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau pembayaran (*fee*) kontrak untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (*recycling*).
2. Biaya daur ulang yang dijual
3. Biaya penelitian dan pengembangan (Litbang) yang terdiri dari biaya total untuk material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

Menurut IFAC, (2005) dalam Burhany (2014), agar dapat mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi maka perusahaan harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan tujuan dari semua energi, air dan bahan yang digunakan. Untuk itu harus diketahui berapa yang digunakan, berapa yang menjadi produk akhir dan berapa yang menjadi limbah. Dalam perhitungan ini ada 2 aspek yang digunakan yaitu aspek fisik dan moneter. IFAC menjelaskan masing-masing aspek tersebut sebagai berikut:

1. Data dan informasi fisik

Akuntansi manajemen lingkungan (*environmental management accounting/EMA*) menitikberatkan pada pemicu biaya berupa data fisik dan input berupa jumlah energi, air dan bahan serta jumlah output berupa limbah dan emisi karena: (1) jumlah energi, air dan bahan yang digunakan serta limbah yang dihasilkan, berhubungan langsung dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan (2) biaya pembelian bahan merupakan komponen biaya yang cukup besar. Secara fisik perusahaan harus menelusuri semua input dan output sehingga semua terhitung.

2. Data dan informasi moneter

Yang dimaksud data moneter adalah semua biaya dan pengeluaran lingkungan lainnya. Pengklasifikasian biaya lingkungan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan informasi oleh manajemen, pelaporan keuangan maupun pelaporan kepada

stakeholder. Biaya lingkungan juga dapat dikaitkan dengan nilai moneter yang melekat pada energi, air dan bahan, atau pada pengeluaran untuk pengelolaan lingkungan.

Pengelompokan biaya lingkungan yang dilakukan IFAC dalam Burhany (2014) adalah sebagai berikut:

Kelompok 1 – Biaya Bahan dan Output Produk

Kelompok ini meliputi biaya pembelian bahan yang akan dikonversi menjadi produk akhir, produk sampingan dan kemasan. Data biaya ini dapat membantu untuk mengelola biaya lingkungan yang berhubungan dengan bahan supaya lebih efektif. Contohnya, perusahaan mengganti bahan baku dengan bahan yang ramah lingkungan.

Kelompok 2 – Biaya Bahan dari Output Non Produk

Kelompok ini meliputi biaya pembelian bahan yang dikonversi menjadi limbah dan emisi yang terdiri atas bahan bakar, air dan energi. Tidak semua limbah dapat dikurangi namun semakin sedikit bahan, energi dan air yang digunakan, akan semakin baik bagi lingkungan.

Kelompok 3 – Biaya Pengendalian Limbah dan Emisi

Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah: biaya penanganan, perlakuan dan pembuangan limbah dan emisi., biaya perbaikan dan ganti rugi karena kerusakan lingkungan dan semua biaya yang berkaitan dengan pengendalian limbah dan emisi.

Kelompok 4 – Biaya Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Lainnya

Kelompok ini meliputi biaya untuk aktivitas pengelolaan lingkungan yang bersifat mencegah yaitu: biaya pengelolaan *supply-chain* lingkungan, biaya produksi yang lebih bersih, biaya perencanaan dan sistem, biaya pengukuran lingkungan (pengawasan dan audit) dan biaya lainnya.

Kelompok 5 – Biaya Riset dan Pengembangan

Yang dimaksud kelompok ini adalah biaya aktivitas riset dan pengembangan yang berkaitan dengan isu inisiatif lingkungan seperti: biaya riset potensi racun/zat berbahaya pada bahan baku, biaya pengembangan produk ramah lingkungan

atau hemat energi, biaya uji coba desain peralatan baru, yang dapat menghemat penggunaan bahan baku.

Kelompok 6 – Biaya Tak Berwujud

Kelompok ini adalah biaya internal dan eksternal yang sulit teridentifikasi namun nilainya berpotensi signifikan. Contohnya: kewajiban seperti biaya kerusakan alam, biaya regulasi atau biaya di masa yang akan datang akibat efek gas rumah kaca, biaya produktivitas seperti biaya ketidakhadiran pekerja karena sakit akibat polusi, biaya pembentukan *image* dan hubungan dengan *stakeholder* dan biaya eksternalitas yaitu pengaruh eksternal terhadap masyarakat seperti penurunan nilai properti karena dekat dengan pabrik.

Hansen dan Mowen, (2007) dalam Burhany (2014), mengelompokkan biaya lingkungan menjadi:

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention cost*)
Yaitu biaya yang timbul dari aktivitas untuk mencegah kotoran dan limbah produksi merusak lingkungan. Contoh: biaya mendesain proses/produk yang dapat meminimalkan atau menghilangkan polusi, biaya studi dampak lingkungan dan sebagainya.
2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection cost*)
Yaitu biaya yang timbul dari aktivitas untuk menjadikan produk, proses, dan aktivitas lain dalam perusahaan memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Contoh: biaya audit aktivitas lingkungan, biaya melakukan uji, polusi dan sebagainya.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure cost*)
Yaitu biaya yang timbul dari aktivitas yang dilakukan karena kotoran dan limbah telah dihasilkan namun belum dibuang ke lingkungan sekitar perusahaan. Contohnya: biaya pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya, biaya daur ulang sisa bahan dan sebagainya.
4. Biaya kegagalan lingkungan
Yaitu biaya yang timbul setelah kotoran dan limbah dibuang ke lingkungan sekitar

perusahaan. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Biaya kegagalan eksternal yang terealisasi
Yaitu biaya yang ditanggung dan dibayar oleh perusahaan. Contoh: biaya konservasi lahan yang rusak, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar dan sebagainya.
- b. Biaya kegagalan eksternal yang tidak terealisasi
Yaitu biaya yang ditanggung dan dibayar oleh pihak lain di luar perusahaan dan tidak termasuk dalam kelompok biaya lingkungan yang harus diakui atau dibebankan ke perusahaan walaupun timbulnya biaya tersebut disebabkan oleh perusahaan, biasanya secara tidak langsung. Biaya ini disebut juga biaya sosial. Contoh: biaya pengobatan warga yang sakit akibat terkena polusi akibat aktivitas perusahaan, biaya kehilangan lingkungan yang sehat dan sebagainya.

Pencatatan dalam akun untuk biaya lingkungan (unit moneter) dilakukan sebagaimana halnya yang dilakukan dalam akuntansi tradisional. Sementara untuk unit fisik menggunakan ukuran satuan yang disesuaikan dengan bahan atau dampak yang ditimbulkannya. Pengelompokan menurut Hansen dan Mowen ini sangat tepat untuk jika dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja lingkungan karena fokus pada pencegahan sebelum kerusakan terjadi dibandingkan penanganan.

D. PEMBAHASAN

Tahap-tahap Perlakuan Alokasi Biaya

Menurut Mulyani, (2013) dalam Hidayati, (2016) pengelompokan dalam tahap analisis lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) antara lain sebagai berikut:

- a. Identifikasi
Menurut Wahyudi dalam Hidayati, (2016) pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan *eksternalitas* yang mungkin terjadi dalam kegiatan

operasional perusahaan adalah dengan mengidentifikasi dampak-dampak negatif. Sebagai contoh misalnya sebuah pabrik kelapa sawit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya dalam proses pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi sehingga perlunya penanganan khusus, dengan cara mengidentifikasikan limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat dan limbah cair yang berasal dari kegiatan tersebut.

b. Pengakuan

Menurut Yanto dalam Hidayati, (2016) elemen-elemen yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai akun dan disebut sebagai biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mencegah lingkungan dari pencemaran dapat diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

c. Pengukuran

Menurut Wahyudi dalam Hidayati, (2016) perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah di keluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai dengan kebutuhan ril setiap periode. Ikhsan dalam Hidayati, (2016) mengungkapkan bahwa pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda.

d. Penyajian

PSAK No.1 tahun 2015 dalam Hidayati, (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan

tersebut dapat tercapai, PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut digunakan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut, perusahaan harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

Menurut Haryono dalam Hidayati, (2016) model komprehensif yang dapat dijadikan sebagai alternatif model pelaporan keuangan lingkungan secara garis besar dapat dikategorikan dalam empat model yaitu: 1) Model normatif, 2) Model hijau, 3) Model intensif, 4) Model asset nasional,

Dalam hal ini perusahaan dapat memilih alternatif varian dalam menentukan sikap dan bentuk tanggung jawab sosial sesuai proporsional masing-masing perusahaan.

e. Pengungkapan

Wahyudi dalam Hidayati, (2016) mengungkapkan pada umumnya akuntan akan mencatat biaya-biaya tambahan (biaya lingkungan dalam akuntansi konvensional sebagai biaya *overhead* yang berarti belum dilakukan spesialisasi akun untuk biaya lingkungan.

Konsep Model *Green Accounting*

Pelaksanaan *green accounting* sangat bergantung kepada karakteristik perusahaan tersebut di dalam memahami permasalahan lingkungan hidup. Pemahaman permasalahan lingkungan hidup akan mengarahkan perusahaan di dalam kebijakannya terutama terkait dengan keselamatan lingkungan hidup (Astuti, 2012). Ginsberg dan Paul dalam Astuti (2012) memberikan arahan beberapa matrik kondisi perusahaan terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di perusahaan. Matrik kondisi perusahaan terkait dengan kebijakan industri ramah lingkungan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. *Lean Green*. *Lean Green* mencoba untuk menjadi bagian sosial yang baik, tetapi mereka tidak fokus pada publikasi untuk

menciptakan produk/jasa yang ramah lingkungan. Meskipun demikian mereka termotivasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi melalui aktivitas yang ramah lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan persaingan yang kompetitif dalam hal produk rendah biaya, dan bukan semata untuk keselamatan lingkungan.

2. *Defensive Green*. *Defensive Green* seringkali menggunakan *green marketing* sebagai pengukuran yang preventif, suatu respon terhadap krisis atau respon terhadap kegiatan perusahaan pesaing. Mereka berusaha untuk meningkatkan *brand image* dan mengatasi kerusakan, menyadari bahwa segmen industri ramah lingkungan adalah penting dan menguntungkan. Inisiatif lingkungan mereka mungkin serius dan berkelanjutan, tetapi usaha untuk mempromosikan dan mempublikasikan inisiatif tersebut *sprodiac* dan terkadang temporer dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan dirinya dengan kompetitor lain pada permasalahan lingkungan hidup tersebut. Perusahaan dalam kondisi ini akan melakukan kegiatan promosi peduli lingkungan hidup dalam skala kecil baik untuk kegiatan-kegiatan tertentu ataupun program-programnya. Sehingga dari sinilah mereka dapat bertahan dan berargumen manakala industri mereka dikritik oleh aktivis peduli lingkungan ataupun bahkan pesaing.
3. *Shaded Green*. *Shaded Green* menginvestasikan dalam jangka panjang, menyeluruh proses industri yang ramah lingkungan yang membutuhkan komitmen tinggi terhadap keuangan dan non keuangan. Perusahaan dengan tipe ini memandang lingkungan sebagai kesempatan untuk mengembangkan inisiatif kebutuhan-pemenuhan produk dan teknologi yang dihasilkan dalam proses yang mengutamakan persaingan yang menguntungkan. Mereka memiliki kemampuan untuk membedakan dirinya dengan sebenarnya pada isu lingkungan ini, tetapi mereka memilih untuk tidak

melakukannya disebabkan mereka dapat mencari keuntungan dengan mengutamakan permasalahan lain selain isu lingkungan. *Shaded green* pada prinsipnya mempromosikan secara langsung kelebihan yang dapat dihitung berkaitan dengan produk mereka melalui saluran yang utama. Keuntungan akan produk/jasa yang ramah lingkungan hanya mereka promosikan sebagai faktor pendukung saja.

4. *Extreme Green*. Filosofi dan nilai yang menyeluruh membentuk perusahaan dalam tipe ini. Isu tentang produk yang ramah lingkungan diintegrasikan secara penuh ke dalam bisnis dan proses siklus daur ulang produk perusahaan ini. Seringkali permasalahan produk ramah lingkungan menjadi tujuan yang mengarahkan perusahaan dari hari ke hari. Praktik yang terjadi tersebut mencakup pendekatan penentuan harga, pengelolaan lingkungan yang berbasis pada TQM dan tentang pengelolaan untuk masalah lingkungan.

Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Menurut Hermiyetti dan Dondokambey (2012) dalam Wanggono, (2016) tujuan akuntansi lingkungan adalah:

1. Sebagai alat manajemen lingkungan Untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya-biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, menilai tingkat dan capaian tiap tahun agar menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang berlangsung secara terus-menerus.
2. Sebagai alat komunikasi dengan masyarakat Akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak yang disampaikan kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari para pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan

balik perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Penerapan akuntansi lingkungan juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengelola limbah tersebut dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan (Islamey, 2016)

Menurut Carolina *et al* (2011) dalam Suka, (2016) akuntansi lingkungan bertujuan dua hal, yaitu untuk internal manajemen dan eksternal perusahaan (*shareholder*).

Peraturan Terkait *Green Accounting*

Terdapat beberapa peraturan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan setiap pemilik usaha atau badan maupun perseroan untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya atas lahan dan lingkungan yang digunakan dalam menjalankan operasi perusahaan.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 yang berisi tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjelaskan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dengan peraturan undang-undang tersebut menimbulkan kesukarelaan dari perusahaan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan karena kepedulian yang timbul akan keberlangsungan hidup makhluk hidup dan perusahaan itu sendiri.

Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau *green* (Suratno dalam Nuryanti dkk, 2015). Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan yang diciptakan sehubungan dengan dampak aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan.

Di Indonesia, penerapan kinerja lingkungan diukur dari prestasi perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yaitu instrumen yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penilaian dan pemeringkatan ketaatan perusahaan dalam melakukan kinerja lingkungannya (Fitriani, 2013). Dengan menggunakan indikator warna emas sebagai peringkat terbaik, diikuti dengan warna hijau, biru, merah dan untuk peringkat terburuk diindikasikan dengan warna hitam. Program ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong pentaataan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan mendapat insentif atau disintensif reputasi, tergantung pada tingkat ketaatannya. Perlu ditingkatkan ukuran kinerja lingkungan untuk memperbaiki kinerja yang telah ada (Astuti, 2012). Aspek penilaian dalam PROPER difokuskan pada penilaian ketaatan perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kewajiban lain yang terkait dengan analisis

mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penetapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), konservasi dan pemanfaatan sumber daya, serta kegiatan sosial perusahaan.

Pelaksanaan PROPER bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penataan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan
2. Meningkatkan komitmen para *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan
4. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Tabel Indikator Peringkat Proper

PERINGKAT	KETERANGAN
Emas	Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.
Biru	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Bagi mereka yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hitam	Diberikan kepada mereka yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya, telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Sistem peringkat kinerja PROPER dibagi menjadi 5 (lima) warna yaitu:

- | | | |
|----------|----------------------|----------|
| 1. Emas | : sangat sangat baik | skor = 5 |
| 2. Hijau | : sangat baik | skor = 4 |
| 3. Biru | : baik | skor = 3 |
| 4. Merah | : buruk | skor = 2 |
| 5. Hitam | : sangat buruk | skor = 1 |

Pengukuran kinerja lingkungan dilakukan sebagai proksi *green accounting*. Karena *green accounting* umumnya diterapkan oleh perusahaan yang memiliki perhatian dan minat terhadap kelestarian lingkungan. Perhatian dan minat tersebut direpresentasikan oleh perusahaan dengan cara ikut andil dalam pemerintah yaitu PROPER guna memacu peningkatan kinerja lingkungan yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Karena semakin meningkatnya kinerja lingkungan perusahaan, maka perusahaan semakin menerapkan *green accounting* dengan baik. Pengalokasian biaya-biaya lingkungan didapat dari pengelompokan aspek-aspek lingkungan yang lebih dahulu di analisis di dalam kinerja lingkungan. Contohnya, biaya pencegahan kerusakan lingkungan. Aspek pencegahan kerusakan lingkungan ini didasari pada aspek kinerja lingkungan tentang pengendalian-pengendalian pencemaran lingkungan yang dihasilkan perusahaan. Jika perusahaan ingin melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, perusahaan akan melakukan efisiensi pencemaran dengan cara melakukan pengukuran pencemaran rutin yang tentunya menjadi biaya. Hal tersebut menunjukkan hubungan kinerja lingkungan dengan *green accounting* sangat kuat. Peningkatan kinerja keuangan dari penerapan *green accounting* bermula pada minat konsumen dan masyarakat yang bersedia membayar lebih tinggi untuk mendapatkan produk yang berorientasi lingkungan sehingga berakhir pada peningkatan penjualan yang meningkatkan kinerja keuangan.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Supit dkk (2015) kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui

struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan harus diketahui output maupun inputnya. Output adalah hasil dari suatu kinerja karyawan, sedangkan input adalah hasil dari suatu keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Menurut Munawir (2010:30) dalam Dewa (2015), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan.

Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Jumingan dalam Dewa (2015) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Dengan demikian, untuk dapat memperoleh gambaran dan informasi tentang perkembangan kinerja keuangan perusahaan perlu mengadakan analisa atau interpretasi terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin di dalam laporan keuangan.

Dalam melakukan analisa atau interpretasi, dapat menggunakan dua macam perbandingan yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dengan perusahaan lain yang sejenis dan pada waktu yang sama.

Menurut Munawir (2012:238) dalam Dewa, (2015) ada 4 (empat) kelompok rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
3. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil.
4. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Menurut Riyanto (2010:330) dalam Dewa, (2015) apabila dilihat dari sumber darimana rasio ini dibuat, maka dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Rasio neraca (*balance sheet ratios*), yang digolongkan dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari atau bersumber dari neraca
2. Rasio-rasio laporan laba-rugi (*income statement ratios*), yang tergolong dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari laba-rugi.
3. Rasio-rasio antar laporan (*interstatement ratios*), yang tergolong dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari neraca dan laporan laba-rugi.

Sebagaimana dijelaskan Sucipto dalam Supit dkk (2015), kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, kinerja keuangan bisa dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dalam mengukur tingkat profitabilitas dapat digunakan perhitungan rasio profitabilitas atau disebut juga dengan rasio rentabilitas. Menurut Supit dkk (2015) rasio rentabilitas ini meliputi:



a. *Gross profit margin* (margin laba kotor) rumusnya adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Gross Profit Margin merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

b. *Net profit margin* (margin laba bersih) rumusnya adalah:

$$\text{Nett Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin*-nya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan.

c. *Return on Equity* rumusnya adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, bagi saham biasa maupun saham preferen.

Penerapan *Green Accounting* di Perusahaan dan pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan

Dalam penerapan *Green Accounting*, perusahaan melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan untuk mencapai kinerja lingkungan yang hijau dan baik. Bentuk upaya-upaya yang dilakukan adalah:

1. Melakukan efisiensi kegiatan operasional
2. Mengurangi pemakaian energi fosil

3. Menerapkan kebijakan ramah lingkungan 5R yaitu; *Refuse* (menolak hal yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan), *Reduce* (mengurangi dan menghemat pemakaian barang), *Reuse* (menggunakan kembali apa saja yang bisa digunakan), *Repair* (memperbaiki barang yang masih bisa diperbaiki untuk digunakan lagi), *Recycle* (mengkonversi bahan limbah menjadi benda yang dapat dimanfaatkan kembali).
4. Melakukan pengukuran lingkungan yang meliputi pengukuran pencemaran udara, emisi kendaraan, dan air limbah domestik. Pengukuran dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh pihak ketiga yang telah tersertifikasi dan hasilnya akan dibandingkan dengan Nilai Ambang Baku Mutu untuk masing-masing parameter.
5. Melakukan tes laboratorium untuk air minum karyawan yang meliputi parameter fisik, kimia dan mikrobiologi. Hal ini dilakukan untuk memastikan air minum karyawan sehat dan memenuhi baku mutu air minum yang dipersyaratkan pemerintah.
6. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi tatacara penyimpanan, pengumpulan, pengolahan dan dokumentasi limbah B3. Dalam pelaksanaan penyimpanan ini, perusahaan mempunyai 2 lokasi penyimpanan sementara limbah B3 yang telah mendapat ijin dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam. Limbah B3 berupa sisa oli, sisa kemasan bahan kimia atau bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 maksimal selama 90 hari sebelum limbah tersebut diambil dan dikelola oleh pihak ketiga yang telah mempunyai ijin Pengelolaan Limbah B3 dengan pengawasan dan rekomendasi dari Bapedal Kota Batam.
7. Mengikuti program (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang disingkat PROPER. Dengan pelaksanaan PROPER, maka perusahaan akan diaudit oleh tim pengawas dari Kementerian

Lingkungan Hidup untuk kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

8. Melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dilaporkan secara rutin kepada Bapedal. UKL/UPL ini diterapkan untuk mengawasi, mengurangi dan mengantisipasi kemungkinan dampak yang muncul bagi lingkungan dan masyarakat.

Berikut ini perbandingan antara klasifikasi pengelompokan dalam tahap analisis lingkungan berdasarkan PSAK menurut Mulyani, (2013) dengan perusahaan:

Tabel Klasifikasi Tahap Analisis Lingkungan PSAK

No.	Keterangan	PSAK	Perusahaan
1.	Pengakuan biaya lingkungan	Belum adanya peraturan tentang pengakuan biaya-biaya lingkungan. Yang diatur dalam PSAK tentang kewajiban dan aktiva.	Ada pengakuan tentang biaya lingkungan dalam laporan keuangan.
2.	Pengukuran biaya lingkungan	Belum mengatur tentang pengukuran biaya lingkungan. Yang diatur dalam PSAK pengukuran tentang aktiva, kewajiban diukur sebesar <i>historical cost</i> .	Pengukuran biaya lingkungan di ambil dari acuan realisasi anggaran periode sebelumnya. Karena biaya lingkungan diakui secara periodik oleh perusahaan.
3.	Penyajian biaya lingkungan, Menurut Haryono, terdapat empat model penyajian biaya lingkungan yaitu model normatif, modal hijau,	1. Normatif: mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang akun secara umum bersama akun lain yang serumpun.	Biaya lingkungan disajikan dengan model normatif.

	model intensif dan model aset nasional.	2. Hijau: menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih. 3. Intensif: pengeluaran disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi. 4. Aset nasional: menginterpretasikan pembiayaan lingkungan sebagai aset nasional.	
4.	Pengungkapan biaya lingkungan	Belum ada standar yang mengatur tentang pengungkapan lingkungan.	Mengungkapkan dan menyajikan biaya lingkungan dalam laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah perusahaan.

Berdasarkan perbandingan tersebut perusahaan menggambarkan biaya lingkungan dengan kebijakan sendiri dan diungkapkan secara sukarela karena belum ada peraturan tertentu dari PSAK tentang pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan.

Pada tabel dibawah ini disajikan dasar pengelompokan biaya-biaya berdsarkan teori Hansen Mowen, 2007 dalam Burhany (2014) dengan yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan:

Tabel Klasifikasi Aspek Perhitungan dan Pencatatan Biaya Lingkungan

No	Deskripsi	Hansen Mowen	Perusahaan
1.	Akuntansi Lingkungan	Biaya Pencegahan Lingkungan:	
		1 Perhitungan dan pencatatan biaya, mengevaluasi dan	√

	gan Moneter	memilih peralatan pengendalian lingkungan		
		2 Perhitungan dan pencatatan biaya pengembangan/desain proses/produk yang ramah lingkungan	√	
		3 Perhitungan dan pencatatan biaya pelatihan karyawan untuk masalah lingkungan	√	
		4 Perhitungan dan pencatatan biaya pengembangan sistem pengelolaan lingkungan	√	
		5 Pemilihan bahan baku ramah lingkungan	√	
		Biaya Deteksi Lingkungan:		
		6 Perhitungan dan pencatatan biaya audit lingkungan	√	
		7 Perhitungan dan pencatatan biaya pemeriksaan proses produksi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan lingkungan	√	
		8 Perhitungan dan pencatatan biaya dalam melakukan uji emisi	√	
		9 Perhitungan dan pencatatan biaya pemeriksaan kandungan limbah berbahaya dalam produk	√	
		Biaya Kegagalan Internal Lingkungan:		
		10. Melakukan perhitungan dan pencatatan biaya pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya	√	
11. Melakukan perhitungan dan pencatatan biaya daur ulang bahan sisa untuk digunakan kembali	√			
12. Melakukan perhitungan dan pencatatan biaya daur ulang air untuk digunakan kembali	√			
2.	Akuntansi Lingkungan Fisik	Kelompok Input:		
		1. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah	√	

		dan persentase bahan yang didaur ulang	
		2. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah energi yang dihemat	√
		3. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah air yang diambil dari alam	√
		4. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah dan persentase air yang didaur ulang dan digunakan kembali	√
		5. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah air yang dibuang/terbuang	√
Kelompok Output:			
		6. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah emisi gas yang dihasilkan	√
		7. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah limbah yang dihasilkan	√
		8. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah / persentase limbah yang diolah	√
		9. Melakukan perhitungan dan pencatatan jumlah limbah yang dibuang	√

DAFTAR PUSTAKA

- Aniela, Yoshi. (2012). "Peran Akuntansi Lingkungan dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan".
- Astuti, Neni (2012). "Mengenal *Green Accounting*".
blh.kepriprov.go.id
- Dewa, Aditya Putra, (2015). "Analisis Kinerja Keuangan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk di Bursa Efek Indonesia".



- Dewi, Santi Rahma. (2016). "Pemahaman dan Kepedulian Penerapan *Green Accounting* : Studi Kasus UKM Tahu di Sidoarjo"
- Hamta, Firdaus. "*Metodologi Penelitian Akuntansi*". Penerbit: Deepublish. Yogyakarta. 2015.
- Hidayati, Nurul, Afriyanto, dan Arma Yuliza. (2016). "Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan".
- Ikhsan, Arfan. "*Akuntansi Manajemen Lingkungan*". Penerbit: Graha Ilmu. Jakarta. 2008.
- Islamey, Fika Erisya (2016). "Perlakuan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Paru Jember".
menlh.go.id
- Musyarofah, Siti (2013). "Analisis Penerapan *Green Accounting* di Kota Semarang"
- _____. *Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
- Nuryanti, Tira Novi, Nurlily dan Yuni Rosdiana, (2015). "Pengaruh Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Tekstil Wilayah Bandung".
- Riska Dewi Setyaningsih dan Nur Fadrih Asyik, (2016). "Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Pemoderasi.
- Suka, Eka Andala (2016). "Efektivitas Akuntansi Lingkungan dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan".
- Supit, Thessalonica S.F, Welly .A. Areros, Johny .R.E. Tampi, (2015). "Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Astra Internasional, Tbk".
- Wanggono, Antonius Wasi (2016). "Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan"
- _____. *Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.